

MENGUKUR KEMAJUAN KORPORASI TERHADAP KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

Memetakan kuesioner pengungkapan perusahaan
CDP 2021 terhadap kunci target lingkungan



DAFTAR ISI

Disusun oleh:

**Collective Consulting
Group**
Consultant

Nur Arifiandi
Policy Engagement
Manager, Forests

Rini Setiawati
Senior Manager, Forests

Helen Finlay,
Senior Global Policy
Manager, Forests

03	TENTANG RINGKASAN INI
04	TEMUAN UTAMA
05	PENDAHULUAN
06	KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
08	HASIL PEMETAAN
09	Mendorong Pencapaian TPB Melalui Pengungkapan
12	Mendorong Pengelolaan Lingkungan Melalui Keuangan Berkelanjutan
14	Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Pemeringkatan Kinerja Lingkungan
15	SINERGI ADAPTASI IKLIM, TANPA DEFORESTASI, DAN KETAHANAN AIR DI INDONESIA
16	PENGUNGKAPAN CDP DAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN INDONESIA
18	DAFTAR PUSTAKA
20	LAMPIRAN
21	Lampiran 1. Kesesuaian antara Kuesioner CDP dan Indikator Lingkungan RAN TPB
23	Lampiran 2. Kesesuaian Kuesioner CDP dengan aspek lingkungan di POJK no.51 / POJK.03/2017
24	Lampiran 3. Kesesuaian Kuesioner CDP dengan beberapa aspek PROPER PERMENLHK No. 1/2021

Pemberitahuan Penting

Isi dalam laporan ini dapat digunakan oleh siapapun dengan mencantumkan CDP sebagai sumber informasi. Namun hak tersebut tidak termasuk untuk mengemas ulang serta menjual data apapun yang dilaporkan kepada CDP maupun para penulis yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Jika anda bermaksud untuk mengemas ulang maupun menjual salah satu isi dalam laporan ini, anda harus mendapatkan izin tertulis dari CDP terlebih dahulu.

Tidak ada representasi ataupun jaminan (tertulis maupun tak tertulis) dari CDP atas keakuratan ataupun kelengkapan informasi dan opini dalam laporan ini. Anda tidak boleh serta merta mengambil tindakan berdasarkan informasi dalam publikasi ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak profesional. Sepanjang diizinkan oleh peraturan perundangan, CDP tidak menerima atau menanggung kewajiban, tanggungjawab, atau kewajiban apapun atas segala konsekuensi perbuatan anda maupun pihak lain, atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dengan mengandalkan informasi dalam laporan ini, atau untuk segala keputusan yang diambil berdasarkan informasi pada laporan ini.

Segala informasi dan pandangan yang diungkapkan oleh CDP dalam laporan ini berdasarkan pada penilaian saat laporan ini dibuat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan dikarenakan faktor ekonomi, politik, industri dan alasan khusus dari perusahaan. Komentar dari para kontributor yang dituangkan dalam laporan ini merupakan pandangan pribadi dari masing-masing penulis; pernyataan tersebut bukan merupakan dukungan dari mereka. CDP, perusahaan atau perusahaan anggota afiliasinya, atau pemegang saham, anggota, mitra, kepala, direktur, pejabat dan/atau karyawan, mungkin memiliki sekuritas pada perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan di beberapa negara dan juga tidak cocok untuk semua jenis investor; nilai sekuritas dan pendapatan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan/atau dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang.

CDP merujuk kepada CDP North America, Inc. sebuah organisasi nirlaba dengan status yayasan sosial 501(c)3 di Amerika Serikat dan CDP Worldwide, dengan nomor pendaftaran yayasan sosial n 1122330 dan nomor pendaftaran perusahaan terbatas dengan jaminan dan terdaftar di Inggris dengan nomor 05013650.

© 2021 CDP. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

TENTANG RINGKASAN INI

Transparansi dan akuntabilitas data melalui pengukuran yang terstandarisasi adalah alat penting untuk memastikan kemajuan menuju keberlanjutan. Alat-alat ini memainkan peran penting dalam memantau kemajuan dan menilai kontribusi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG).

Ringkasan ini menganalisis dan memetakan hubungan antara kuesioner CDP 2021 dan tiga kebijakan utama terkait lingkungan dan iklim yang mengatur lembaga keuangan (LK), penerbit, dan perusahaan Indonesia:

- ▶ Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk TPB¹;
- ▶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan nomor 51/POJK.03/2017;
- ▶ Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER), yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ulasan singkat ini menyoroti implikasi dari kebijakan-kebijakan yang tercakup dalam kuesioner CDP dan menilai kontribusi dunia komersial terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ruang lingkup analisis mencakup aspek lingkungan dan tata kelola kebijakan, serta memberikan studi kasus tentang praktik terbaik untuk aksi korporasi berdasarkan data pengungkapan CDP. Metodologi yang digunakan memetakan indikator dan bagian kebijakan yang telah dikodifikasi dengan setiap pertanyaan tematik CDP 2021 yang selanjutnya menentukan tingkat relevansi berdasarkan skala, dari tidak selaras hingga selaras². Analisis deskriptif kemudian menentukan besarnya kesesuaian CDP dan kontribusi satuan data terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan di atas. Terakhir, studi kasus menggambarkan wawasan yang dihasilkan dari data CDP.



TEMUAN UTAMA



Data dari kuesioner pengungkapan CDP dapat digunakan untuk memantau kemajuan korporasi terhadap kebijakan penting terkait keberlanjutan di Indonesia melalui kesesuaian 66 pertanyaan di tiga instrumen kebijakan



Kuesioner CDP selaras dengan 36 dari 77 (47%) indikator dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Studi ini menemukan kesesuaian dalam topik-topik seperti efisiensi energi, inisiatif pengurangan emisi, kegiatan terkait keanekaragaman hayati dan ketahanan air.



Satuan data CDP berisi informasi yang relevan dengan 13 indikator kinerja lingkungan yang ditetapkan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang terdiri dari target iklim, keanekaragaman hayati, konservasi, dan pengelolaan limbah.



Dari 212 indikator pengelolaan lingkungan dalam kerangka evaluasi PROPER, 61 (28%) selaras dengan pertanyaan CDP. Tingkat keselarasan tertinggi antara indikator PROPER dan pertanyaan CDP adalah pada bagian pengurangan emisi (39%), diikuti oleh aspek penilaian daur hidup (33%).

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim berdasarkan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen pada tahun 2030, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui upaya sendiri, atau sebesar 41% dengan dukungan internasional³.

Sebagai pengakuan atas keterkaitan antara menjaga lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah melengkapi tujuan iklimnya dengan komitmen untuk mencapai 17 TPB guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan⁴.

Memenuhi tujuan Paris Agreement dan TPB membutuhkan kontribusi dari sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari otoritas pemerintah di semua tingkatan hingga bisnis, pelaku pasar modal, dan aktor non-negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa langkah regulasi untuk mendorong dan mengkoordinasikan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, terutama para pelaku di sektor swasta. Langkah-langkah tersebut antara lain Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, peraturan POJK 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, dan Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER).

Sejak tahun 2003, perusahaan dan pemerintah kota, provinsi, dan kabupaten telah menggunakan kuesioner CDP untuk lebih memahami dan mengukur risiko

lingkungan terhadap bisnis atau lokalitas mereka. Perusahaan dan pemerintah juga menggunakan kuesioner untuk melaporkan inisiatif mitigasi dan untuk memantau kemajuan terhadap tujuan lingkungan mereka, termasuk TPB. Sistem pengungkapan memungkinkan entitas pelapor untuk mengungkapkan data di tiga tema: perubahan iklim, hutan, dan ketahanan air. Mengingat keterkaitan antara perubahan iklim, deforestasi, dan sumber daya air, perusahaan dan pemerintah daerah didorong untuk melaporkan data tentang ketiga tema tersebut.

Dalam kuesioner perubahan iklim, data entitas pelapor berkaitan dengan manajemen risiko perubahan iklim, termasuk konsumsi energi dan emisi langsung serta emisi yang terdapat dalam rantai nilainya. Kuesioner hutan memungkinkan pengungkap untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak risiko yang terkait dengan produksi dan pengadaan komoditas hutan berisiko tinggi. Entitas pelapor menggunakan kuesioner ketahanan air CDP untuk melaporkan aksi yang terkait dengan pengamanan pasokan air dan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan penurunan kualitas air.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

A. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk TPB

Untuk memenuhi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan TPB-nya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diterbitkan pada tahun 2017. Keputusan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan⁵. Untuk memberikan arahan tambahan dalam upaya pencapaian TPB, pada tahun 2018, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 7/2018 yang menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia untuk TPB.

RAN berisi panduan tentang koordinasi dan perencanaan upaya kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai TPB di Indonesia. RAN untuk TPB juga memberikan pedoman untuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi upaya berbagai pemangku kepentingan⁶. Demikian pula, klasifikasi kegiatan usaha berkelanjutan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)^{7,8} telah diadopsi untuk mengukur dan mendorong kontribusi pelaku non-negara.

B. POJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keberlanjutan Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK 51/POJK.03/2017 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk perkembangan menuju TPB. Peraturan tersebut mengamanatkan lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. Entitas ini diwajibkan untuk mengembangkan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan menyampaikan laporan keberlanjutan tahunan kepada OJK. Untuk membantu lembaga keuangan meningkatkan pangsa perusahaan berkelanjutan dalam portofolio pembiayaan dan/atau pinjaman mereka, peraturan tersebut mendefinisikan dan mengklasifikasikan kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Klasifikasi ini kemudian dimasukkan oleh Bappenas ke dalam RAN.

11 kategori aktivitas bisnis yang berkelanjutan meliputi⁹:

	Energi terbarukan
	Efisiensi energi
	Pencegahan dan pengendalian polusi
	Pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan
	Konservasi keanekaragaman hayati tanah dan air
	Transportasi berkelanjutan
	Pengelolaan air limbah yang berkelanjutan
	Adaptasi terhadap perubahan iklim
	Penggunaan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang
	Bangunan hemat energi dengan standar atau sertifikasi nasional, regional dan internasional
	Kegiatan usaha berkelanjutan lainnya

C. PROPER (Program Penilaian Kinerja Lingkungan)

Sejak tahun 1997, ruang lingkup PROPER telah diperluas untuk mencakup indikator TPB dan hasil analisis daur hidup¹⁰. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, sejak 2018 PROPER telah mengintegrasikan kriteria TPB ke dalam pelaporannya. Hingga tahun 2019, 2.045 perusahaan telah menggunakan penilaian PROPER dan melaporkan hasilnya melalui sistem informasi pelaporan elektronik (SIMPEL).

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperbarui PROPER lebih lanjut dengan Peraturan No. 1/2021. PROPER versi terbaru mendorong bisnis dan industri untuk melakukan analisis daur hidup untuk semua barang dan jasa. Analisis harus memberikan

profil lingkungan yang komprehensif sehubungan dengan penggunaan air dan energi serta emisi dan timbulan limbah.

Penilaian PROPER mencakup dua fase: kepatuhan (*compliance*) dan melampaui kepatuhan (*beyond compliance*). Kriteria dalam *compliance* tahap mengukur kesesuaian antara aktivitas perusahaan dan persyaratan lingkungan yang relevan. Pada fase *beyond compliance*, kriteria lebih komprehensif dan mengintegrasikan indikator keberlanjutan utama, termasuk pengembangan teknologi dan kepatuhan terhadap praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya¹¹. Rincian klasifikasi PROPER dapat dilihat pada Tabel 1¹².

Tabel 1: Kriteria penilaian PROPER.

Tahap Penilaian	Peringkat	Indikator
 Compliance	Hitam	Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang: <ul style="list-style-type: none"> menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan; melanggar hukum dan peraturan yang berlaku; atau tidak memenuhi sanksi administratif.
	Merah	Pemenuhan sebagian atau tidak lengkap dari persyaratan perlindungan lingkungan yang relevan.
	Biru	Kepatuhan penuh terhadap peraturan perlindungan lingkungan yang relevan.
 Beyond Compliance	Hijau	Bukti standar tinggi dalam pengelolaan lingkungan, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> penggunaan kerangka kerja pengelolaan lingkungan; tingkat efisiensi sumber daya yang tinggi; dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.
	Emas	Demonstrasi lingkungan unggul secara kontinyu dalam sistem manufaktur atau layanan, serta praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial.



HASIL PEMETAAN

MENDORONG PENCAPAIAN TPB MELALUI PENGUNGKAPAN

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 TPB-nya menempatkan degradasi lingkungan, keberlanjutan, perubahan iklim, hilangnya hutan, dan ketahanan air di bawah sorotan internasional. Sejak itu, CDP secara aktif terlibat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, mengakui hubungan intrinsiknya dengan kesehatan lingkungan.

Pada tahun 2021, CDP melakukan analisis untuk memahami hubungan antara kuesioner dan TPB. Analisis menemukan bahwa platform pelaporan CDP memiliki wawasan yang relevan dengan semua (enam)¹³ TPB lingkungan (Gambar 1)¹⁴:

CDP melakukan pemetaan antara kuesioner CDP terhadap RAN untuk TPB. Kajian tersebut

menunjukkan bahwa satuan data CDP dapat memberikan wawasan untuk 47% (36 dari 77) indikator yang ditentukan dalam RAN untuk TPB. Relevansi dari masing-masing kuesioner CDP ditunjukkan pada Lampiran 1. Kuesioner CDP ini dapat memberikan wawasan berdasarkan kategori aktivitas bisnis yang berkelanjutan, melalui pertanyaan secara langsung atau gabungan¹⁵.



Gambar 1. Indikator lingkungan TPB



Perubahan Iklim

Kuesioner perubahan iklim CDP terdiri dari 311 pertanyaan yang berfokus pada tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengelola risiko terkait iklim, yakni pemanfaatan energi dan emisi. Analisis menemukan bahwa 69 pertanyaan dapat menghasilkan

wawasan untuk sekitar 33% (25 dari 77) indikator yang ditetapkan dalam RAN untuk TPB, terutama dalam indikator konsumsi atau efisiensi energi, energi terbarukan, perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan limbah.



Hutan

Secara keseluruhan, 19% (15 dari 77) indikator dalam RAN untuk TPB dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan Hutan CDP. Keselarasan terbesar adalah untuk RAN untuk TPB 15 (Menjaga ekosistem darat), yang menekankan pada indikator 'pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan'. Poin data yang diambil dalam kuesioner hutan dapat memberikan wawasan tentang beberapa

indikator ini, seperti luas total terestrial konservasi keanekaragaman hayati, serta data yang lebih terperinci tentang aktivitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi (15.1.2.[a]). Kuesioner hutan CDP juga memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan sehubungan dengan RAN untuk TPB 12 dan 13, sertifikasi manajemen lingkungan entitas responden (PROPER dan SNI ISO 14001) dan strategi dalam menangani risiko bencana.



Ketahanan Air

Kuesioner ketahanan air CDP mengambil data yang relevan dengan 11 dari 77 indikator RAN untuk TPB. RAN-TPB 6 memiliki kesesuaian terbesar dengan kuesioner ini, meliputi efisiensi penggunaan air (6.6.1*), fasilitas Sanitasi dan Kebersihan Air (WASH) (6.2.1*), pengelolaan limbah (6.3.1.[a]), tekanan air (6.4.2) dan kapasitas air baku (6.1.1*). Mengingat

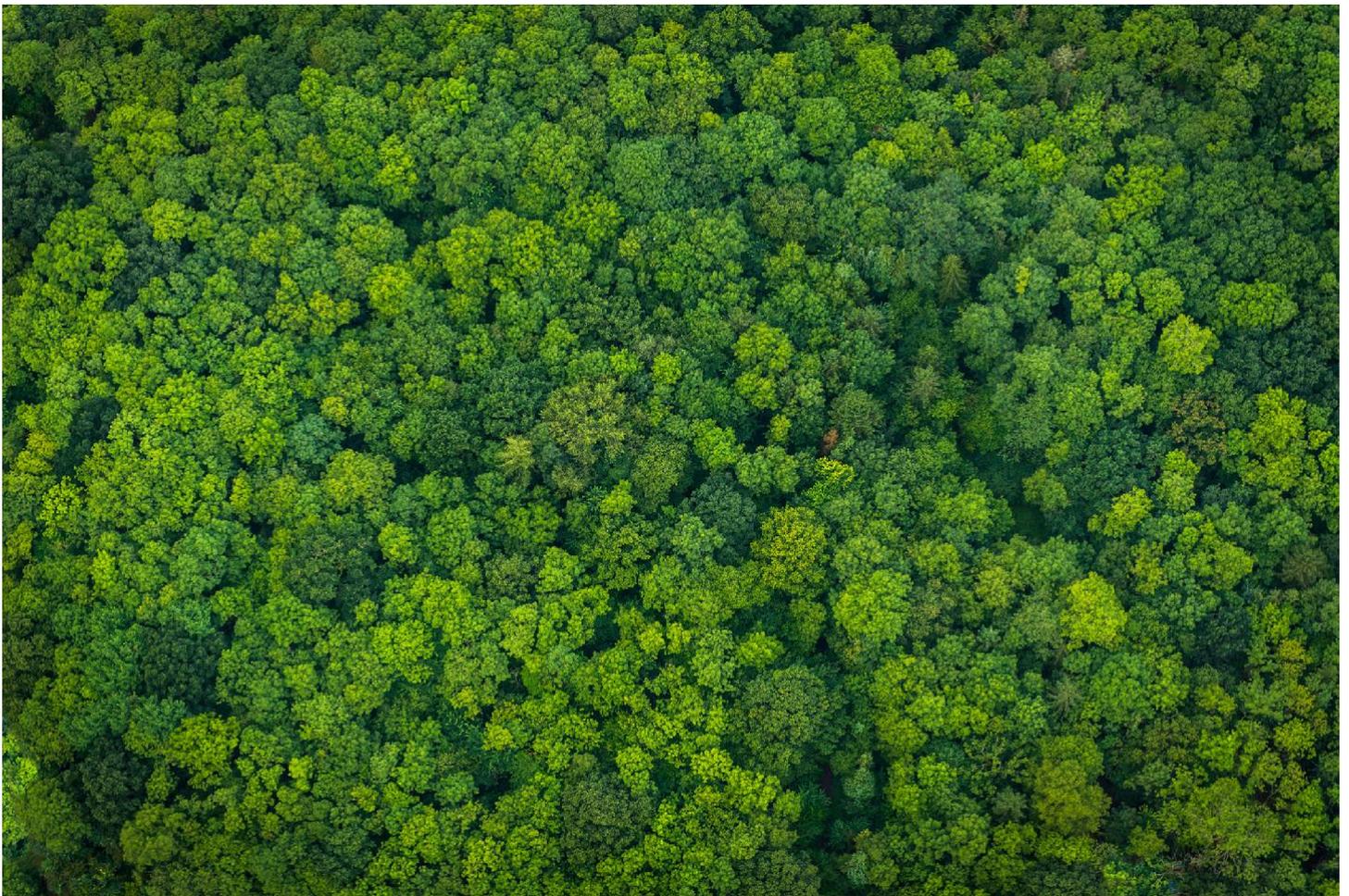
hubungan erat antara konsumsi air dan efisiensi air, beberapa pertanyaan CDP menjawab kedua masalah tersebut. Selain itu, tanggapan terhadap kuesioner ketahanan air dapat menghasilkan wawasan berharga mengenai indikator yang relevan dengan pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3)¹⁶.

STUDI KASUS ASIA PULP AND PAPER



RAN untuk TPB mengharuskan perusahaan untuk merencanakan dan mengukur perkembangan kegiatan berkelanjutan mereka. Asia Pulp & Paper (APP), salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar di dunia, telah mengungkapkan data kepada CDP sejak tahun 2012, ketika APP mengembangkan Visi Peta Jalan Keberlanjutan 2020¹⁷. Peta Jalan tersebut telah diperbarui hingga 2030¹⁸. Peta Jalan Keberlanjutan APP dikembangkan sejalan dengan RAN untuk TPB dan telah diintegrasikan ke dalam rantai nilai APP.

Pada tahun 2020, APP telah mengurangi emisi karbon mereka sebesar 23%¹⁹, dan intensitas energi sebesar 11% dibandingkan dengan tahun 2012²⁰ baseline. APP juga meningkatkan konsumsi energi terbarukan sebesar 6%²¹ dan menyisihkan 600.000 hektar (sekitar 21% dari wilayah konsesinya) sebagai hutan lindung di dalam konsesi. Pada tahun 2019, APP berencana untuk menambah restorasi sejumlah 30.000 hektar hutan dan telah mencapai 21.000 hektar dari komitmen ini di tahun yang sama²². Selanjutnya, APP berkontribusi terhadap RAN untuk TPB nomor 6.6.1* dengan mengurangi intensitas airnya sebesar 31%²³, dibandingkan dengan tahun 2013, yang merupakan konsumsi air tawar terendah selama operasinya²⁴.



MENDORONG PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memiliki potensi untuk mendorong praktik berkelanjutan dalam portofolio mereka dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan melalui kebijakan pinjaman, investasi, dan penjaminan emisi. Pemberlakuan POJK 51/POJK.03/2017 meresmikan praktik ini dan mengamanatkan agar LJK dan pelaku korporasi mengambil peran lebih aktif dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Data CDP memberikan wawasan yang substansial tentang aspek lingkungan dari POJK 51/POJK.03/2017. Beberapa bagian dari kuesioner CDP sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu modul tentang tata kelola dan kinerja lingkungan. Karena kuesioner CDP tidak mencakup indikator-indikator sosial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, upah dan pemberdayaan masyarakat, informasi yang berkaitan dengan bagian-bagian peraturan ini tidak tercakup dalam satuan data CDP.



Perubahan Iklim

POJK 51/POJK.03/2017 mengakui pentingnya mengintegrasikan aksi iklim untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Hal ini tercermin dari terintegrasinya beberapa indikator terkait iklim. Hasil analisis menunjukkan bahwa data perubahan iklim CDP dapat dikaitkan dengan 77% (10 dari 13) persyaratan pelaporan kinerja lingkungan/ekologi yang ditentukan oleh POJK 51/

POJK.03/2017. Sekitar 47 pertanyaan perubahan iklim CDP mengambil data tentang pengurangan emisi dan limbah, diikuti oleh 32 pertanyaan tentang indikator konsumsi energi dan intensitas (Tabel 3). Selain data energi, limbah, dan emisi, CDP memberikan wawasan menyeluruh tentang standar, protokol, dan metodologi yang digunakan para pengungkap untuk mencatat dan menghitung emisi.



Hutan

Selain fokus pada isu iklim, POJK 51/POJK.03/2017 juga mengakui dampak kegiatan usaha terhadap ekosistem, termasuk hutan dan keanekaragaman hayati. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perusahaan mengungkapkan dampak merugikan dari kegiatan bisnis terhadap hutan. Perusahaan juga diharuskan untuk mengungkapkan tanggapan mereka terhadap risiko terkait hutan dan biaya lingkungan yang dikeluarkan.

Analisis tersebut menemukan bahwa 38% (5 dari 13) data lingkungan yang disyaratkan dalam POJK 51/POJK.03/2017 tercakup dalam satuan data Hutan CDP. CDP menggunakan indikator berwawasan progresif dalam kuesioner hutan yang membantu para pemangku kepentingan memahami dan memperkirakan potensi kerugian ekonomi dari deforestasi dan mengukur perkembangan tindakan untuk melindungi hutan.



Ketahanan Air

Kuesioner ketahanan air CDP menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk menilai risiko terkait air dan dampak keuangan terkait. Kuesioner juga meminta perusahaan untuk mendemonstrasikan proses mereka dalam mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko terkait air dalam

operasional langsung dan rantai nilai mereka. Kuesioner diselaraskan dengan tiga indikator umum:

- ▼ Kinerja Aspek Lingkungan/Ekologis (21 poin data)
- ▼ Efisiensi Energi (11 poin data)
- ▼ Total Tata Kelola Berkelanjutan (18 poin data).

STUDI KASUS PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK.



PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) adalah perusahaan holding komoditas pertanian. Kegiatan usaha utamanya adalah pengolahan dan perdagangan minyak sawit. ANJ telah mengakui pentingnya isu-isu keberlanjutan serta mengintegrasikan keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan. Isu-isu mengenai iklim dan konservasi hutan merupakan hal yang biasa dalam rapat dewan. *Chief Sustainability Officer* perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keberlanjutan perusahaan, yang meliputi pelestarian ekosistem di dalam konsesi perusahaan, nihilnya pembakaran lahan, dan tidak ada deforestasi, gambut, atau eksploitasi (NDPE). Menurut tanggapan ANJ dalam kuesioner CDP, pada tahun 2019, perusahaan mengalokasikan sekitar \$696.034 USD untuk mengelola risiko hutannya²⁵. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap nihilnya pembakaran lahan, ANJ meningkatkan anggaran untuk manajemen risiko sebesar 43,6%, menjadi \$1.000.000 USD pada tahun 2020²⁶.

Menyadari pentingnya aspek sosial-ekonomi dari pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2019, ANJ meluncurkan pembangunan yang bertanggung jawab (RD), yang mendorong karyawan perusahaan untuk berkontribusi pada tujuan keberlanjutan perusahaan. Melalui program RD, ANJ telah mengimplementasikan inisiatif Peduli Keanekaragaman Hayati-PENDAHI, yang mempromosikan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bersifat wajib bagi karyawan ANJ, dan mencakup 15% dari indikator kinerja utama. Manajemen ANJ telah menerapkan kebijakan untuk menyesuaikan remunerasi, bonus dan kriteria kelayakan untuk promosi dalam rangka mengembangkan budaya keberlanjutan di perusahaan, sebagaimana disyaratkan oleh POJK 51/POJK.03/2017.



MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM PEMERINGKATAN KINERJA LINGKUNGAN

Pelaksanaan PROPER menyoroti keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan agenda pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2018, PROPER telah secara aktif melaporkan kontribusinya terhadap 17 pilar TPB melalui penilaian mereka terhadap kepatuhan melampaui legalitas²⁷, yang paling sesuai dengan satuan data CDP. Bagian PROPER perihal analisis daur hidup (LCA) dan sistem manajemen lingkungan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kuesioner CDP (lihat Lampiran 3).



Perubahan Iklim

Kuesioner perubahan iklim CDP menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur eksposur mereka terhadap risiko terkait iklim dan untuk mengukur kemungkinan dampak keuangan dari risiko ini. Kuesioner mendorong pendekatan bertahap untuk meningkatkan ketahanan iklim dengan menerapkan efisiensi energi,

mengurangi emisi absolut dan intensitas emisi, mengadopsi energi terbarukan, dan meningkatkan kinerja iklim melalui penetapan target yang ambisius. Data perubahan Iklim CDP memberikan wawasan untuk 38% (12 dari 31) indikator penurunan emisi dalam PROPER, yang terdiri dari kebijakan emisi, pengelolaan, perencanaan, pelaporan, dan implementasi.



Hutan

Hutan merupakan elemen penting untuk memenuhi Kontribusi Nasional Indonesia (*Nationally Determined Contribution*). Dalam komitmennya, pemerintah Indonesia bertujuan untuk secara mandiri mengurangi 29% emisinya pada tahun 2030, dengan porsi terbesar (63%) pengurangan berasal dari perubahan tata guna lahan, gambut, dan sektor kehutanan²⁸.

Mengembalikan hutan dan melindungi keanekaragaman hayati ditekankan dalam indikator lingkungan PROPER, dan kriteria ini yang paling sesuai dengan kuesioner hutan CDP. Secara total, 36% (10 dari 28) kriteria konservasi keanekaragaman hayati PROPER dapat dicakup oleh kuesioner hutan CDP.



Ketahanan Air

Awalnya, PROPER dibuat untuk mengatasi pencemaran air di bantaran sungai yang disebabkan oleh bisnis dan berfokus pada pengelolaan air dan pengendalian pencemaran. Perusahaan diminta untuk melaporkan target dan sasaran terkait air mereka, serta metode mereka untuk memantau target

terkait air. Kuesioner ketahanan air CDP meminta perusahaan untuk melaporkan data ini. Hasilnya, data Ketahanan Air CDP memberikan wawasan rinci tentang efisiensi air dan tindakan pengurangan beban air limbah yang dilakukan oleh perusahaan, yang mencakup 22% (6 dari 27) indikator PROPER.

STUDI KASUS MUSIM MAS



Musim Mas adalah perusahaan kelapa sawit terintegrasi di Indonesia, memproduksi berbagai macam produk melalui anak perusahaannya, termasuk minyak goreng, margarin, minyak pemendekan, lemak goreng, lilin kelapa sawit, gliserin, dan sabun²⁹. Berkomitmen untuk menjadi bisnis kelapa sawit berkelanjutan, Musim Mas telah menunjukkan keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan telah menerima Peringkat PROPER Hijau selama tiga tahun berturut-turut³⁰.

Musim Mas telah mengungkapkan tindakan lingkungannya kepada CDP sejak tahun 2017. Menanggapi ancaman deforestasi dan kebakaran hutan di sekitar perkebunan kelapa sawitnya, Musim Mas telah melaksanakan proyek konservasi pada 10% lahan gambut yang dikelolanya dan telah menyisihkan sebanyak 24.220 hektar lahan untuk tujuan konservasi, yang mewakili 12% dari total hak atas tanah mereka³¹. Dikarenakan adanya risiko dalam mengembangkan daerah stres air, termasuk penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah yang ekstensif, Musim Mas juga mengungkapkan tingkat intensitas airnya dalam pengungkapannya kepada CDP. Di tahun 2019, perusahaan telah mengurangi tingkat intensitas air dibawah 1,25 m³/MT pada proses pengelolaan tandan buah segar (TBS) dan akan mengurangi menjadi 1,2 m³ pada tahun 2021³².

Untuk mengurangi emisi metana dari kegiatan pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (POME), Musim Mas telah membangun 14 fasilitas penangkap metana³³, dengan fasilitas tambahan yang dibangun pada tahun 2021³⁴. Melalui fasilitas ini, Musim Mas telah mampu mendaur ulang metana dan menggunakannya untuk menghasilkan listrik.

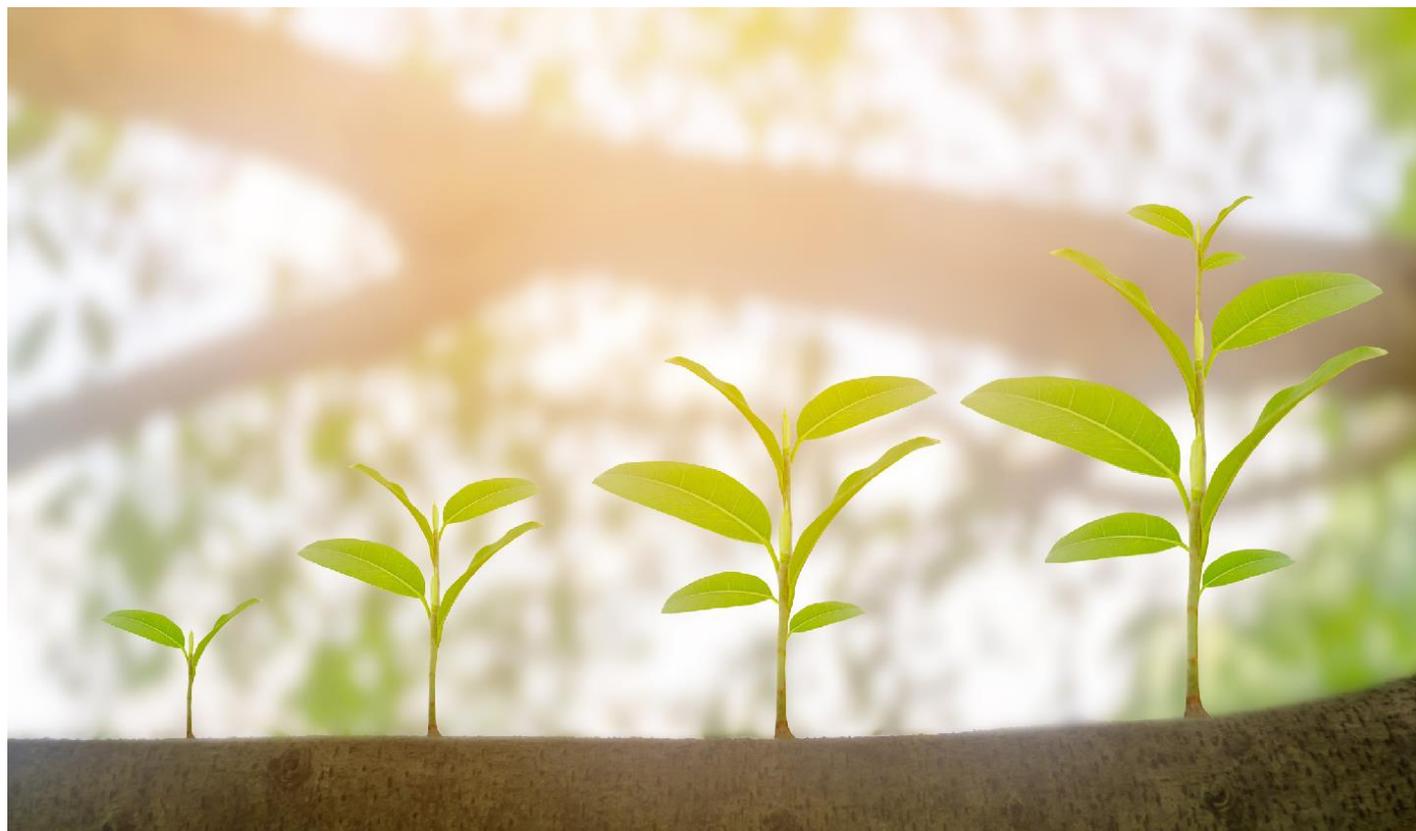


SINERGI ADAPTASI IKLIM, TANPA DEFORESTASI, DAN KETAHANAN AIR DI INDONESIA

Tujuan dari ketiga kebijakan (RAN untuk TPB, POJK 51/POJK03/2017 dan PROPER) adalah untuk mendorong para pelaku di sektor swasta untuk mengambil tindakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan pemetaan, ketiga kebijakan tersebut berkaitan dengan sejumlah 66 pertanyaan CDP. Sebagian besar hubungan (35) ditemukan dalam kuesioner perubahan iklim CDP, diikuti oleh 20 kuesioner ketahanan air dan 11 kuesioner hutan. Kuesioner perubahan iklim menyoroti aksi korporasi pada adaptasi dan target untuk pengelolaan limbah dan isu-isu lingkungan dan terkait iklim lainnya. Kuesioner hutan memberikan wawasan untuk pengelolaan penggunaan lahan dan isu-isu terkait keanekaragaman hayati, sedangkan kuesioner ketahanan air mengambil data tentang konsumsi dan efisiensi air.

Kuesioner CDP juga mencakup beberapa pertanyaan yang selaras sebagian dengan ketiga kebijakan tersebut, sehingga memberikan kumpulan data yang saling melengkapi. Sebagai contoh, data CDP memberikan wawasan RAN untuk TPB tentang jumlah perusahaan peringkat Biru berdasarkan PROPER. Selanjutnya, pertanyaan yang sepenuhnya sesuai dengan indikator PROPER dapat mengukur seberapa efektif perusahaan menerapkan standar pengelolaan lingkungan.



PENGUNGKAPAN CDP DAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN INDONESIA

Dengan memberlakukan RAN untuk TPB, POJK 51/POJK.03/2017 dan PROPER, pemerintah Indonesia telah membuka jalan bagi aksi korporasi yang tegas dalam mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan transparansi. Peraturan ini dapat meningkatkan kolaborasi publik-swasta untuk mencapai kelestarian lingkungan, sekaligus menyoroti perkembangan Indonesia menuju target 2030.

**Kebijakan yang saling terkait:
menimbulkan hubungan dan potensi
sinergi melalui data CDP**

RAN untuk TPB bertindak sebagai interpretasi nasional dari komitmen internasional; merupakan kerangka penting untuk memandu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lebih lanjut, POJK 51/POJK.03/2017 dan PROPER merupakan alat penting untuk memastikan kontribusi berbagai sektor dalam mencapai pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemetaan ini, kami menemukan indikator yang selaras di ketiga kebijakan, banyak di antaranya dapat dihubungkan secara langsung atau tidak langsung melalui data CDP. Oleh karena itu, platform CDP dapat memberikan wawasan dan mendukung pembuat kebijakan dalam melacak kemajuan implementasi kebijakan ini, memungkinkan sinergi dan keselarasan di antara para aktor.

**Mendemonstrasikan perkembangan:
CDP memungkinkan perusahaan untuk
menunjukkan kepemimpinan lingkungan
dan memberikan wawasan untuk
pengembangan kebijakan**

Kerangka CDP memungkinkan perusahaan untuk menilai potensi dampak lingkungan pada kinerja keuangan mereka dan

mengembangkan strategi untuk menjamin resiliensi. Wawasan yang dilaporkan oleh perusahaan tentang tindakan lingkungan mereka dapat membantu pemerintah mengawasi perkembangan menuju tujuan keberlanjutan, mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam implementasi kebijakan, dan menginformasikan perkembangan kebijakan di masa depan.

**Dari wawasan menuju aksi: Data CDP
memberikan wawasan kepada pembuat
kebijakan dalam mendorong aksi korporasi
terhadap kelestarian lingkungan**

Data CDP menyediakan data kuantitatif dan kualitatif yang terstandarisasi, sebanding, dan dapat menghasilkan wawasan yang berarti bagi perusahaan dan investor. Ini juga mendukung pembuatan kebijakan yang efektif mengenai paparan risiko lingkungan di antara perusahaan. Informasi ini dapat memicu kesadaran dan mendorong aksi untuk memastikan bahwa potensi risiko dikelola dengan tepat. Bagi pembuat kebijakan, data yang dikumpulkan dari perusahaan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk efektivitas kebijakan, serta dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemetaan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs berdasarkan Metadata versi II
2. Untuk memastikan akurasi, pemetaan menghilangkan pertanyaan administratif CDP dan hanya fokus pada pertanyaan tematik
3. Indonesia Green Growth Program (2016) Diskusi NDC dalam Upaya Mengurangi Emisi Nasional, Indonesia Green Growth Program, Diakses 25 Maret 2020: <http://greengrowth.bappenas.go.id/diskusi-ndc-dalam-upaya-mengurangi-emisi-nasional/>
4. Bappenas (2020), Kick-off Pembuatan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs 2020-2024, Diakses 22 Maret 2020: <http://sdgs.bappenas.go.id/kick-off-pembuatan-rencana-aksi-nasional-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpb-sdgs-2020-2024/>
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
6. Peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) 2017-2019 untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Diakses 25 Maret 2020: https://www.bappenas.go.id/files/2115/3309/4644/Siaran_Pers_-_The_Launching_of_National_Action_Plan_NAP_2017-2019_to_Achieve_Sustainable_Development_Goals_SDGs.pdf
7. Bappenas (2020), Buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs: <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>
8. Pedoman Teknis Pernapasan Keuangan Berkelanjutan, 2018, retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Teknis-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor-Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2051%202017.pdf>
9. Otoritas Jasa keuangan (2018). PEDOMAN TEKNIS BAGI BANK TERKAIT IMPLEMENTASI POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK), EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Teknis-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor-Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2051%202017.pdf>
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kriteria PROPER. <https://proper.menlhk.go.id/proper/kriteria>
12. Kementerian Lingkungan Hidup (2012), How the Gold PROPER Award Drives Five Major Companies Achieve Innovation, Value Creation and Environmental Excellence, Accessed April 06, 2021: <https://PROPER.menlhk.go.id/PROPERcms/uploads/magazine/docs/buku/buku-PROPER.pdf>
13. Pilar lingkungan di TPB adalah: TPB 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 11; Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim and TPB 15 Menjaga Ekosistem Daratan
14. CDP (2021), Insights from CDP Data to Assess Progress and Drives Action on the Sustainable Development Goals: https://lnkd.in/g_Si4gg

15. Pertanyaan langsung berisi kumpulan data yang hanya berkontribusi pada satu indikator/variabel; pertanyaan gabungan berkontribusi pada berbagai indikator/variabel.
16. "Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia" sumber: Permendag no. 31 / 2016
17. Kuesioner Pelaporan CDP, Asia Pulp & Paper - Perubahan Iklim 2020, hal. 1
18. APP Sustainability Roadmap Vision 2030, Accessed March 17, 2020: <https://asiapulppaper.com/sustainability-report-2019>
19. Kuesioner Pelaporan CDP, Asia Pulp & Paper - Perubahan Iklim 2020, hal.12-24
20. Kuesioner Pelaporan CDP, Asia Pulp & Paper - Perubahan Iklim 2020, hal. 25-36
21. Kuesioner Pelaporan CDP, Asia Pulp & Paper - Perubahan Iklim 2020, hal. 25
22. Kuesioner Pelaporan CDP, Asia Pulp & Paper - Perubahan Iklim 2020, hal. 18
23. Visi Peta Jalan Keberlanjutan APP 2030, Diakses 17 Maret 2020: <https://asiapulppaper.com/sustainability-report-2019>
24. Kuesioner Pelaporan CDP, Asia Pulp & Paper - Ketahanan Air 2020, hal. 3-4
25. Laporan Keberlanjutan PT Austindo Nusantara Jaya 2019, Diakses 9 April 2021: <https://anj-group.com/en/sustainability-report>
26. Kuesioner Pelaporan CDP, PT Austindo - Hutan 2020, hal. 10
27. Buku PROPER 2020, (2020), access at https://drive.google.com/file/d/1hJ_6wY_9ZpBsuO1lc2grCh43ncB6x3qf/view
28. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2017). Buku Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Accessed April 9, 2021. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi_implementasi_ndc.pdf, hal. 2
29. Our Subsidiaries, retrieved by 16 June 2021 at <https://www.musimmas.com/our-subsidiaries/>
30. Musim Mas Juara PROPER 2019 di Sektor Sawit, <https://sawitindonesia.com/musim-mas-juara-PROPER-2019-di-sektor-sawit/>
31. Laporan Keberlanjutan Musim Mas 2019, Diakses 17 Maret 2021: <https://www.musimmas.com/wp-content/uploads/2020/10/Musim-Mas-Sustainability-Report-2019.pdf>, hal. 7
32. Laporan Keberlanjutan Musim Mas 2019, Diakses 17 Maret 2021: <https://www.musimmas.com/wp-content/uploads/2020/10/Musim-Mas-Sustainability-Report-2019.pdf>, hal. 8
33. Kuesioner Pelaporan CDP, PT Musim Mas - Perubahan Iklim 2020, hal. 13
34. Laporan Keberlanjutan Musim Mas 2019, Diakses 17 Maret 2021: <https://www.musimmas.com/wp-content/uploads/2020/10/Musim-Mas-Sustainability-Report-2019.pdf>, hal. 8

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.

KESESUAIAN ANTARA KUESIONER CDP DAN INDIKATOR LINGKUNGAN RAN TPB

Tabel 3. Kesesuaian antara Kuesioner CDP dan Indikator Lingkungan RAN TPB

TPB No.	Rencana Aksi Nasional untuk Indikator TPB		Kontribusi CDP Tematik Data Set		
	Kode	Indikator	Perubahan Iklim	Hutan	Ketahanan Air
 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman			
	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun			✓
	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman			✓
	6.6.1*	Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu	✓		✓
	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)			✓
	6.4.2.(a)	"Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya"			✓
	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya			✓
 7 Energi Bersih dan Terjangkau	6.4.2.(b)	Intensitas energi primer	✓		
	7.b.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt)	✓		
	7.2.1*	Bauran energi terbarukan	✓		
	7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	✓		
 9 Transportasi dan Infrastruktur	9.4.1 (a)	Pengurangan gas rumah kaca (GRK) dalam industri	✓		
	9.4.1 (b)	Intensitas emisi dalam industri	✓		
	9.4.1*	Rasio emisi CO2 / GRK ke dalam nilai tambah dalam sektor manufaktur	✓		
 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	11.4.1 (a)	Persentase sampah nasional yang terkelola	✓		

TPB No.	Rencana Aksi Nasional untuk Indikator TPB		Kontribusi CDP Tematik Data Set		
	Kode	Indikator	Perubahan Iklim	Hutan	Ketahanan Air
 <p>12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab</p>	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	✓		✓
	12.4.2*	"(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya /pengelolaannya"	✓		
	12.7.1.(b)	"Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk pengadaan Barang dan Jasa"	✓	✓	
	12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline (HFC)	✓		
	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	✓	✓	✓
	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	✓	✓	✓
	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	✓		
	12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	✓	✓	
 <p>13 Penanganan Perubahan Iklim</p>	13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	✓	✓	
	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	✓	✓	
	13.1.2*	Planning and implementation of a national disaster management strategy which is in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	✓		
	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim	✓		
	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun		✓	
 <p>15 Menjaga Ekosistem Daratan</p>	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	✓	✓	
	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	✓	✓	
	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	✓	✓	
	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis		✓	
	15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan		✓	
	15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan		✓	
	15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL		✓	

*Ringkasan aspek yang dinilai dalam RAN SDGs. Kolom 4-6 mengacu pada kuesioner CDP: CC - Perubahan Iklim, F - Hutan, WS - Ketahanan Air. Tanda centang di kolom 4-6 mencerminkan tanggapan perusahaan terhadap kuesioner CDP dapat memberikan data yang relevan dengan elemen terkait dalam RAN.

LAMPIRAN 2.

KESESUAIAN KUESIONER CDP DENGAN ASPEK LINGKUNGAN DI POJK NO.51/POJK.03/2017

Tabel 4. Kesesuaian Kuesioner CDP dengan aspek lingkungan dalam POJK No.51/POJK.03/2017

Indikator Ringkas	Perubahan iklim	Hutan	Ketahanan air
Aspek Ekonomi	20%	0%	0%
Produk ramah lingkungan	✓		
Aspek Lingkungan	0%	0%	0%
Aspek Sosial - Dampak positif dan negatif implementasi keuangan berkelanjutan untuk masyarakat dan lingkungan			
Ringkasan Profil Perusahaan	10%	0%	10%
Keanggotaan dalam Asosiasi	✓		✓
Dewan Direksi	31%	8%	38%
Kebijakan nilai keberlanjutan			✓
Kebijakan tanggapan dan implementasi			✓
Komitmen kepemimpinan	✓	✓	✓
Managemen risiko (ESG)	✓		
Peluang dan prospek bisnis	✓		✓
Faktor eksternal terhadap keberlanjutan	✓		✓
Tata Kelola Keberlanjutan	57%	43%	43%
Peran management	✓	✓	✓
Prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol risiko	✓	✓	✓
Keterlibatan pemangku kepentingan	✓	✓	✓
Pendekatan terhadap pemangku kepentingan	✓		
Kinerja Keberlanjutan	100%	0%	100%
Aktivitas untuk membangun budaya keberlanjutan	✓		✓
Aspek Kinerja Ekonomi	50%	0%	0%
Perbandingan target dan kinerja	✓		
Aspek Kinerja Lingkungan Hidup	80%	0%	40%
Total biaya lingkungan hidup	✓		
Material ramah lingkungan	✓		
Total konsumsi dan intensitas energi	✓		✓

Indikator Ringkas	Perubahan iklim	Hutan	Ketahanan air
Efisiensi energi dan konsumsi energi terbarukan	✓		✓
Aspek kinerja lingkungan hidup dengan proses bisnis yang berdampak langsung dengan lingkungan	46%	38%	31%
Aktivitas atau area operasional yang memberikan dampak positif/negatif terhadap lingkungan dan ekosistem		✓	✓
Dampak positif dan negatif dari operasional di dalam area konservasi		✓	
Aktivitas konservasi dalam keanekaragaman hayati dan melindungi spesies terancam punah	✓	✓	
Total emisi dan intensitas berdasarkan scope	✓	✓	
Aktivitas pengurangan emisi	✓	✓	
Total limbah atau efluen menurut tipe	✓		✓
Manajemen limbah dan efluen	✓		✓
Data tumpahan (jika data)	✓		
Komplain atau kasus lingkungan yang terselesaikan			✓
Pengembangan Produk/ Jasa Keuangan	40%	60%	0%
Inovasi dan pengembangan produk atau keuangan berkelanjutan	✓	✓	
Total atau persentase produk bersertifikasi untuk konsumen		✓	
Dampak positif dan negatif dari aktivitas keberlanjutan	✓	✓	

*Ringkasan aspek yang dinilai dalam P.OJK No.51/2017. Baris abu-abu menunjukkan di mana tanggapan perusahaan terhadap kuesioner CDP dapat memberikan data yang relevan dengan unsur terkait OJK No. 51/2017. Kolom 2-4 mengacu pada kuesioner CDP: CC - Perubahan Iklim, F - Hutan, WS - Ketahanan Air. Persentase pada kolom 2-4 mencerminkan proporsi keselarasan antara setiap kuesioner CDP dan total indikator per bagian.

LAMPIRAN 3.

KESESUAIAN KUESIONER CDP DENGAN BEBERAPA ASPEK PROPER PERMENLHK NO. 1/2021

Tabel 5. Kesesuaian Kuesioner CDP dengan beberapa aspek PROPER PERMENLHK No. 1/2021

Bagian	Sub-bagian	Perubahan Iklim	Hutan	Ketahanan air	Keseluruhan
B. Aspek dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan (DRKPL)		13%	2%	4%	16%
Pengantar	1. Profil Perusahaan	✓			
Pengantar	2. Deskripsi Perusahaan	✓	✓		
Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan		✓			
Sertifikasi Gedung Ramah Lingkungan		✓			
Efisiensi Energi	1. Status	✓			
Pengurangan Emisi	1. Status	✓			
Pengurangan Emisi	2. Hasil Absolut	✓			
Efisiensi Air dan Pengurangan Beban Limbah Air	1. Status: a. Efisiensi Air			✓	
Efisiensi Air dan Pengurangan Beban Limbah Air	1. Status: b. Pengurangan Beban Air			✓	
C. Spek penilaian daur hidup		17%	22%	6%	33%
Perencanaan		✓	✓	✓	
Analisis Daur Hidup (LCA)		✓	✓		
Sertifikasi			✓		
D. Sistem manajemen lingkungan		14%	14%	11%	19%
Kebijakan		✓	✓	✓	
Perencanaan		✓	✓	✓	
Implementasi		✓	✓		
Upaya Pengecekan dan Perbaikan			✓	✓	
Tinjauan Kinerja		✓	✓	✓	
Rentang Pengaruh		✓	✓	✓	
E.1. Aspek efisiensi energi		18%	0%	0%	18%
Kebijakan Efisiensi Energi		✓			
Perencanaan		✓			
Pelaporan		✓			
Implementasi Program		✓			
Program Implementation		✓			

Bagian	Sub-bagian	Perubahan Iklim	Hutan	Ketahanan air	Keseluruhan
E.2. Aspek pengurangan emisi		39%	0%	0%	39%
Kebijakan Pengurangan Emisi		✓			
Perencanaan		✓			
Inventori Emisi		✓			
Pelaporan		✓			
Implementasi Program		✓			
E.3. Efisiensi air dan pengurangan limbah		0%	0%	22%	22%
Kebijakan Efisiensi Air dan Pengurangan Limbah				✓	
Struktur dan Kebijakan				✓	
Perencanaan				✓	
Pelaporan				✓	
E.5. Pengurangan dan pemanfaatan limbah b3		9%	0%	0%	9%
Perencanaan		✓			
Implementasi Program		✓			
E.6. Aspek konservasi keanekaragaman hayati		0%	36%	0%	36%
Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati			✓		
Perencanaan			✓		
Implementasi Program			✓		

*Ringkasan aspek yang dinilai dalam PROPER PERMENLHK NO. 1/2021. Baris hijau menunjukkan di mana tanggapan perusahaan terhadap kuesioner CDP dapat memberikan data yang relevan dengan bagian dan sub-bagian PROPERS yang sesuai. Kolom 3-5 mengacu pada kuesioner CDP: CC - Perubahan Iklim, F - Hutan, WS - Ketahanan Air. Persentase pada kolom 3-5 mencerminkan proporsi keselarasan antara setiap kuesioner CDP dan total indikator per bagian.

Untuk informasi silahkan hubungi:

CDP Policy Engagement

Helen Finlay,
Senior Global Policy Manager, Forests
helen.finlay@cdp.net

Nur Maliki Arifiandi
Policy Engagement Manager, Forests
Nur.arifiandi@cdp.net

CDP Worldwide
4th Floor
60 Great Tower Street
London EC3R 5AZ
Tel: +44 (0) 20 3818 3900
www.cdp.net

Didukung oleh:

the David &
Lucile Packard
FOUNDATION

Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba internasional yang menggerakkan sistem pengungkapan lingkungan bagi perusahaan dan pemerintah. Didirikan di tahun 2000, CDP bekerjasama dengan 590 investor yang memiliki aset 110 triliun Dolar AS, CDP merupakan pionir yang menggunakan pasar modal dan pengadaan perusahaan untuk memotivasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya, dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan perlindungan sumber air dan perlindungan hutan. Lebih dari 10.000 perusahaan diseluruh dunia mengungkapkan data lingkungan melalui CDP pada tahun 2020, termasuk lebih dari 9.600 perusahaan atau setara lebih dari 50% kapitalisasi pasar global, lebih dari 940 kota, provinsi dan kabupaten yang mewakili kombinasi populasi lebih dari 2,6 milyar penduduk. CDP sepenuhnya sejalan dengan TCFD, kami memegang kumpulan data lingkungan terbesar di dunia, dan penilaian CDP digunakan secara luas untuk mendorong keputusan penanaman modal dan pembelian yang menuju nol (zero) karbon, ekonomi yang berkelanjutan dan Tangguh. CDP adalah salah satu pendiri dari Science Based Target Initiative, We Mean Business Coalition, The Investor and the Net Zero Asset Managers Initiative.

Kunjungi <https://cdp.net/en> atau ikuti kami di @CDP untuk informasi lebih lanjut.